

**KARYA ILMIAH**

**PERAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN  
PREKONOMIAN INDONESIA**



Oleh :

**Ir. Abdul Rahman, MS  
NIP. 131. 625.827**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 6**

## KATA PENGANTAR

Karya ilmiah ini disusun berdasarkan pengamatan studi pustaka yang mencoba menelaah peran agribisnis dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Dalam kondisi krisis ekonomi yang kita hadapi, kenyataan faktual peranan dan kontribusi sector agribisnis sangat penting dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Sistem agribisnis yang utuh dan saling terkait diantara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu sub sistem jasa penunjang agribisnis)

Kiranya paparan isi dari makalah ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran yang perlu didiskusikan untuk mendapatkan solusi yang komprehensif bagi pengembangan agribisnis dan peranannya dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Akhirnya terkandung suatu harapan saran dan masukan pada pembaca demi kelengkapan isi dari tulisan ini

Medan, Juli 2006

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Sistem Agribisnis .....	3
1.3. Peranan Agribisnis .....	4
<b>BAB II            POSISI STRATEGIS AGRIBISNIS DALAM                           PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA</b> .....	7
2.1. Landasan Teoritis dan Fakta Empiris .....	8
2.2. Peranan Agribisnis Dalam Perekonomian Nasional .....	9
<b>BAB III            MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN                           AGRIBISNIS</b> .....	11
3.1. Kelemahan Mendasar .....	11
3.2. Tantangan Pembangunan Agribisnis .....	14
3.2.1. Perubahan Lingkungan Internasional .....	14
3.2.2. Perubahan Nilai Pada Konsumen Yang Mempengaruhi Prilaku Dalam Membeli Suatu Produk Agribisnis .....	15
3.2.3. Perubahan Lingkungan Domestik .....	17
<b>BAB IV            VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN                           SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS</b> .....	20
4.1. Amanat GBHN Tahun 1999 – 2004 .....	20
4.1.1. Sub Sistem Agribisnis Hulu (up stream agribusiness) .....	20
4.1.2. Sub Sistem Usaha Tani (om farm agribusiness) .....	20
4.1.3. Sub Sistem Pengolahan (down stream agribusiness) .....	21
4.1.4. Sub Sistem Pemasaran .....	21
4.1.5. Sub Sistem Jasa .....	21
4.2. Arah Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis .....	22
4.2.1. Berdaya Saing .....	22
4.2.2. Berkerakyatan .....	22
4.2.3. Berkelanjutan .....	23
4.2.4. Desentraslistis .....	23

<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS</b> .....	25
	5.1. Kebijakan Makro.....	25
	5.1.1. Kebijakan Moneter.....	25
	5.1.2. Kebijakan Fiskal.....	26
	5.2. Kebijakan Pembangunan Industri.....	28
	5.3. Kebijakan Perdagangan/ Pemasaran dan Kerjasama Internasional.....	30
	5.4. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur.....	32
	5.5. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan.....	33
	5.5.1. Pengembangan Lembaga Keuangan.....	33
	5.5.2. Pengembangan Fungsi Penelitian dan Pengembangan.....	35
	5.5.3. Pengembangan SDM.....	37
	5.5.4. Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani.....	39
	5.6. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.....	40
	5.7. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah.....	41
	5.8. Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan.....	42
<b>BAB VI</b>	<b>PELUANG USAHA AGRIBISNIS</b> .....	45
<b>BAB VII</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	48
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengalaman pembangunan ekonomi berbasis pertanian di masa lalu (PJP I) menunjukkan bahwa sector agribisnis telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Peranan klasik dari sector agribisnis dalam perekonomian nasional adalah penyediaan bahan pangan bagi penduduk kita yang saat ini berjumlah 200 juta jiwa lebih. Penyediaan bahan pangan di sini menyangkut dimensi luas seperti jumlah, jenis dan kualitas, ruang (distribusi), dan waktu (setiap hari sepanjang tahun). Dengan peranan sector agribisnis sebagai penyedia bahan pangan yang relatif murah, telah memungkinkan biaya hidup di Indonesia tergolong rendah di dunia. Relatif rendahnya biaya hidup di Indonesia dewasa ini telah menjadi salah satu daya saing perekonomian nasional. Kemudian dengan penyediaan bahan pangan yang cukup dan stabil yang diperankan oleh sector agribisnis, telah memberikan sumbangan yang besar bagi stabilitas ekonomi, sosial dan politik sehingga secara keseluruhan menyumbang pada terciptanya iklim kondusif bagi pembangunan di segala bidang.

Dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia, sector agribisnis mempunyai kontribusi sangat besar dan terbesar diantara sector-sector yang ada. Dari data BPS (1996) dengan jumlah angkatan kerja nasional 82 juta jiwa sekitar 46 persen diserap subsector pertanian primer. Bila jumlah angkatan kerja pada subsector agribisnis hulu, subsector agribisnis hilir dan sector jasa yang melayani sector agribisnis

diperhitungkan, maka sekitar 60 persen dari total angkatan kerja nasional diserap oleh sektor agribisnis. Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 4 (empat) orang maka diperkirakan 80 persen dari jumlah penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor agribisnis.

Peranan sektor agribisnis dalam ekspor nasional juga cukup besar dan pangsanya meningkat. Menurut data ekspor Indonesia (statistik perdagangan, 1996) menunjukkan bahwa dari nilai total ekspor Indonesia sebesar US \$25,67 milyar pada tahun 1990, sekitar 43,4 persen berasal dari ekspor produk-produk sektor agribisnis. Pada tahun 1995, dari nilai total ekspor Indonesia sebesar 45,4 milyar, sekitar 55,6 persen berasal dari ekspor produk-produk agribisnis.

Besarnya kontribusi sektor agribisnis dalam total nilai ekspor nasional menunjukkan bahwa sektor agribisnis masih andalan penerimaan devisa negara saat ini. Meningkatnya pangsa pasar agribisnis tersebut, mengindikasikan bahwa sektor agribisnis mampu melampaui pertumbuhan pangsa sektor ekonomi lainnya dalam menyumbang ekspor.

Sektor agribisnis yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia, ditambah dengan kontribusinya yang besar pada ekspor, menunjukkan bahwa sektor agribisnis merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi yang selama ini mampu bertumbuh rata-rata 7,2 persen per tahun. Begitu pula pendapatan perkapita penduduk nasional yang meningkat dari US \$70 pada tahun 1969 menjadi US \$1023 pada tahun 1996, dimungkinkan oleh kontribusi sektor agribisnis nasional.

## 1.2. Sistem Agribisnis

Selama pra dan masa RJP I dapat dikatakan bahwa kita melihat pertanian secara sangat sempit, semata-mata hanya melihat subsistem produksi atau usaha tani. Cara pandang yang lama ini telah berimplikasi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan pertanian (dan pedesaan) yakni pertanian dan pedesaan hanya sebagai sumber produksi primer yang berasal dari tumbuhan dan hewan tanpa menyadari potensi bisnis yang sangat besar yang berbasis produk-produk primer tersebut.

Agribisnis dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan, mengembangkan pembangunan daerah, sumber devisa yang sangat besar. Dalam agribisnis sudah tersirat perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke industri. Pengembangan agribisnis dalam PJP II sangat cocok sekali dengan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Apabila agribisnis berhasil maka sebagaimana pekerjaan besar untuk melaksanakan trilogi pembangunan sudah diselesaikan sebagai bangsa dan negara.

Agribisnis merupakan cara baru melihat pertanian. Cara baru yang dahulu melihat secara sektoral sekarang intersektoral. Dahulu melihat secara subsistem sekarang melihat secara system. Apabila agribisnis usaha tani dianggap sebagai subsistem maka ia tidak terlepas dari kegiatan di agribisnis non-usaha tani seperti agribisnis hulu dan hilir. Jadi pendekatan secara sektoral ke intersektoral, subsistem kepada system dan pendekatan dari produksi ke bisnis. Untuk itu, agribisnis merupakan cara baru melihat pertanian, inilah visi ke depan.

Agribisnis dalam pengertian luas menunjukkan adanya keterkaitan vertical antar subsistem agribisnis serta keterkaitan horizontal dengan system atau subsistem

lain di luar seperti jasa-jasa (finansial dan perbankan, transportasi, perdagangan, pendidikan dan lain-lain).

Keterkaitan luas ini (industri linkages) sudah disadari oleh ekonomi pasca revolusi industri sehingga mereka menekankan arti strategis dari menempatkan pertanian dan pedesaan sebagai bisnis inti (core business) pada tahap pembangunan sebelum lepas landas terutama dalam kaitannya dengan proses industrialisasi.



### 1.3. Peranan Agribisnis

Sumber pertumbuhan utama agroindustri adalah konsumsi masyarakat (private consumption). Artinya perkembangan agroindustri selama ini relatif kurang memberatkan bagi anggaran pemerintah, di samping turut memacu pembentukan modal. Pengembangan agribisnis (pertanian dalam arti yang lebih luas) tidak bertentangan dengan azas kemandirian ekonomi yang diharapkan, bahkan mendukung. Arti penting lain dari gambaran ini adalah bahwa pasar produk agribisnis lebih banyak mengandalkan pasar dalam negeri.

Walaupun begitu, peranan penting agribisnis ini serta perkembangannya di masa depan perlu diwaspadai, sebab dalam kenyataannya penyumbang terbesar ekspor agribisnis adalah produk olehan kayu yang masih bersifat ekstraktif, karena hutan tanaman industri (HTI) kita belum berproduksi. Eksploitasi yang tidak terkendali bisa mengganggu kelestarian sistem penyangga kehidupan dan fungsi lingkungan hidup dari hutan.

Selama ini selalu dibicarakan mengenai deregulasi dan debirokratisasi. Namun hal ini tidak cukup mengembangkan agribisnis yang akan datang karena

posisi yang tidak seimbang antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Oleh karena itu, apabila ingin mengembangkan agribisnis harus dimulai dari usaha agribisnis skala kecil.

Di masa depan, peranan agribisnis skala kecil akan semakin penting dan memiliki keunggulan karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi terutama bagi yang bergerak di bidang jasa
- b. usaha agribisnis kecil bisa bergerak luwes menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-persoalan birokrasi, seperti dialami pengusaha besar
- c. usaha agribisnis kecil memiliki tenaga-tenaga penjualan wirausaha yang tertempa secara alami
- d. perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-produk tahan lama yang dihasilkan secara massal, ke produk-produk yang lebih manusiawi, yang lebih tepat untuk dilayani usaha-usaha kecil

Beberapa faktor keunggulan usaha agribisnis kecil bisa juga tidak tercapai, antara lain misalnya karena kurangnya akses usaha kecil terhadap kredit komersil perbankan. Inilah salah satu kendala yang harus dihadapi usaha kecil di tanah air. Masalah lain yang dihadapi adalah pemasaran, alih teknologi, informasi dan sebagainya.

Salah satu hal lagi yang sangat penting ialah walau bagaimanapun negara kita memiliki keunggulan atau keunikan lokasi. Sebagai daerah tropis, tanaman dan hewan yang diusahakan akan memiliki keikhlasan, yang membedakan dari produk-

produk pertanian subtropis dan daerah dingin. Keikhlasan ini perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam suasana perekonomian dunia yang semakin bebas dan penuh persaingan.

Selama ini yang dapat bersaing di pasar global adalah perkebunan dan kehutanan. Prospek ke depan yang sangat baik adalah agroindustri pangan. Agroindustri pangan merupakan sumber pertumbuhan baru yang cukup cerah untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan dapat dikelola dengan cepat sektor perikanan, peternakan, hortikultura dan pangan sumber karbohidrat.

Kendala-kendala lain yang dapat timbul dalam pengembangan agribisnis, antara lain adalah sumberdaya manusia dan teknologi. Sumberdaya manusia perlu dikembangkan mulai dari tingkat wiraswasta, manajemen, pengetahuan. Teknologi diperlukan untuk memproduksi komoditi terutama teknologi bagi pengembangan dan transfer serta mampu mentransfernya, maka modal akan datang dan infrastruktur akan terbentuk dengan sendirinya. Tantangan yang lain adalah belum banyak badan penelitian yang sudah sadar mengenai pentingnya agribisnis. Pada hal agribisnis merupakan sumber pertumbuhan, penyedia lapangan kerja, mendorong pembangunan desa, sumber devisa dan mengubah struktur dari pertanian ke industri.



## **BAB II**

### **POSISI STRATEGIS AGRIBISNIS**

#### **DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

Pembangunan agribisnis memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat baik dari sisi konstitusional, landasan teoritis dan fakta empiris tentang urgensi sektor agribisnis sebagai sektor andalan, maupun peranannya dalam perekonomian Indonesia.

Amanat konstitusi secara politisi (GBHN-1995-2004) mengamanatkan arah pembangunan ekonomi nasional :

- a. Mengembangkan perekonomian berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan setiap daerah
- b. Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing
- c. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal
- d. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing
- e. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah

- f. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan

### **2.1. Landasan Teoritis dan Fakta Empiris**

- Sektor agribisnis adalah sektor andalan dan merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan juga dapat disebut sektor kunci
- Sektor agribisnis memiliki peranan yang sangat dominan khususnya dalam hal pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan
- Suatu sektor dikatakan sebagai sektor andalan perekonomian nasional yaitu : tangguh, progresif, ukurannya cukup besar, artikulatif dan responsif
- Pembangunan agribisnis sebagai sektor andalan diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional
- Bukti empiris menunjukkan bahwa agroindustri skala kecil dan menengah yang bergerak di sektor makanan, perikanan dan peternakan merupakan sektor komplemen yang dapat dikembangkan untuk mengartikulasikan sektor pertanian



## **2.2. Peranan Agribisnis Dalam Perekonomian Nasional**

- Sektor agribisnis merupakan penyumbang nilai tambah (Value Added) terbesar dalam perekonomian nasional. Tahun 1990, 45 persen dari total nilai tambah dihasilkan dari sektor agribisnis sedangkan pada tahun 1995 mencapai 47 persen dari total nilai tambah
- Pada tahun 1990 dan tahun 1995 kontribusi sektor agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja adalah 74 persen dan meningkat menjadi 77 persen. Total ini berarti cara yang paling tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di Indonesia adalah melalui pembangunan agribisnis
- Dalam ekspor nasional, sektor agribisnis juga merupakan penyumbang terbesar. Kontribusi agribisnis dalam ekspor total Indonesia pada tahun 1990 sebesar 43 persen sedangkan pada tahun 1995 mencapai 49 persen.

Berdasarkan data impor total Indonesia, pangsa impor sektor agribisnis relatif kecil dan cenderung menurun :

- Peranan pembangunan sektor agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dominan, karena cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui pendayagunaan berbagai sumber daya ekonomi yang tersedia di setiap daerah
- Pembangunan agribisnis sangat besar peranannya dalam menunjang terwujudnya sistem ketahanan pangan yang kokoh. Dengan membangun agribisnis yang berbasis pada jeragaman sumber daya hayati di setiap daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi

dan keseimbangan gizi, yang mempertimbangkan budaya dan kelembagaan lokal, secara keseluruhan akan terbangun ketahanan pangan yang kokoh

- Pembangunan agribisnis potensial untuk mencegah dan memperbaiki kemerosotan mutu lingkungan hidup melalui hal-hal berikut :
  - mendorong kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah dan akan mendorong penyebaran penduduk beserta aktivitasnya, sehingga konsentrasi penduduk pada suatu ruang tertentu dapat dikurangi
  - Mendayagunakan keragaman hayati sehingga dapat mempertahankan keanekaragaman hayati
  - Meningkatkan keragaman tumbuhan yang berperan sebagai perkebunan karbon yang efektif mengurangi emisi gas karbon atmosfer
  - Pembangunan agribisnis akan menghasilkan produk-produk yang biodegradable yang dapat terurai secara alamiah
  - Dapat mengurangi tekanan sumber daya alam dan lingkungan hidup

## BAB III

### MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS

#### 3.1. Kelemahan Mendasar

- a. Pembangunan agribisnis di masa lalu lebih terfokus pada pembangunan usaha tani (*on-form agribusiness*) dengan sasaran utama peningkatan produksi. Industri hulu agribisnis (*up-stream agribusines*) yakni industri yang menghasilkan perbenihan, industri agro-kimia agribisnis (*down-agribusines*) yakni industri yang kurang memperoleh perhatian. Barang-barang modal yang diperlukan usaha tani menyebabkan produktivitas usaha tani relatif rendah, akibatnya peningkatan produksi diperoleh dengan perluasan areal (*extensifikasi*) atau mengandalkan sumber daya alam (*faktor-driven*) dan bukan peningkatan produktivitas, hal ini menyebabkan produksi agribisnis Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan perubahan ekonomi

Perkembangan industri pengolahan yang terkait dengan produksi usaha tani mempengaruhi daya serap pasar akan produksi dengan keinginan pasar maupun kurangnya transformasi ke usaha tani. Hal ini sering menimbulkan kelebihan dan kekurangan produksi untuk satu komoditi pada waktu tertentu.

Kekurangan perhatian pada pengembangan industri hilir secara keseluruhan juga melemahkan *penetrasi pasar agribisnis Indonesia*. Meskipun Indonesia mampu menjadi salah satu produsen berbagai komoditi terbesar di dunia seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, karet alam, kopi, kakao, cengkeh dan lain-lain, namun

tidak memiliki *posisi tawar* di pasar internasional. Secara keseluruhan hal-hal di atas menyebabkan daya saing agribisnis Indonesia sangat lemah.

Di samping itu ruang gerak perkembangan organisasi ekonomi petani sangat terbatas di mana ruang gerak hanya pada usaha tani dan sangat kurang menangani industri pengolahan dan industri hulu agribisnis yang da tidak melibatkan organisasi ekonomi petani, akibatnya ada pasar input petani mengalami/ menghadapi *kekuatan monopolistik* sementara pada pasar hasil usaha tani menghadapi *kekuatan monopsonitis*. Struktur seperti ini menyebabkan petani hanya menguasai mata rantai yang bernilai tambah kecil dan berisiko tinggi yakni usaha tani (*onfarm*) sehingga pendapatan petani tetap rendah.

b. Pendekatan pembangunan agribisnis di masa lalu sangat sentralistik dan top-down

- Proses perencanaan pembangunan agribisnis sangat terpusat, kurang melibatkan partisipasi rakyat di setiap daerah, diterapkan secara nasional dan lebih mengandalkan lembaga pemerintah formal sebagai saluran program pembangunan
- Pendekatan pembangunan secara sentralistik dan top-down menimbulkan berbagai dampak negatif :
  - Kreativitas pembangunan khususnya petani kurang berkembang dan cenderung menimbulkan sikap ketergantungan pada bantuan pemerintah

- Kreativitas dan kearifan lembaga-lembaga lokal (*local wisdom*) tidak berkembang, bahkan cenderung menurun
  - Program pembangunan tidak efisien dan efektif karena memerlukan organisasi dan biaya birokrasi pemerintah yang relatif besar, di samping itu program yang dirancang secara nasional tidak sesuai dengan kondisi lokal
- c. Pembangunan agribisnis di masa lalu kurang didukung kebijaksanaan makro ekonomi yang kondusif
- Kebijakan moneter seperti suku bunga dan kredit serta fiskal (alokasi anggaran untuk sektor agribisnis) di masa lalu kurang mendukung
  - Kebijakan perdagangan (*trade-policy*) berupa tarif impor, pajak ekspor dengan nilai tukar rupiah yang overvalued cenderung merugikan agribisnis domestik dan menguntungkan sektor non-agribisnis dan impor. (Ingat kasus gula impor yang sangat memalukan)
  - Secara umum, *tingkat potensi* industri 10 kali lebih tinggi daripada proteksi agribisnis, akibatnya nilai tukar barter agribisnis terhadap industri menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mencerminkan bahwa keuntungan investasi agribisnis lebih rendah dari keuntungan investasi industri sehingga *investor baru* enggan masuk agribisnis, bahkan justru mengalir ke sektor non-agribisnis, konversi dalam agribisnis mudah terjadi dari agribisnis mengalami penghisapan modal (*capital-drain*) dan sumber daya manusia terdidik (*brain-drain*). Hal-hal di atas juga mempengaruhi alokasi kredit perbankan pada agribisnis. Di samping itu sistem

perbankan nasional yang bersifat branch banking sistem dimana perencanaan skim perkreditan kurang mengakomodasikan karakteristik agribisnis suatu daerah, akibatnya rata-rata alokasi kredit pada sektor agribisnis hanya sekitar 10 – 20 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan.

### 3.2. Tantangan Pembangunan Agribisnis

#### 3.2.1. Perubahan Lingkungan Internasional

- Liberisasi perdagangan dunia yang sedang dan akan berlangsung komitmen-komitmen dalam WTO/ GATT untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun nontarif perdagangan hasil-hasil agribisnis mengandung kesempatan sekaligus tantangan
- Negara-negara yang mampu meningkatkan daya saingnya berkesempatan untuk *memperbesar pangsa pasarnya* baik di pasar internasional maupun pasar domestik, sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesainya. (Bagaimana dengan Indonesia)
- Untuk menghadapi Liberasi perdagangan tersebut, bagi Indonesia tidak ada pilihanm kecuali mempercepat peningkatan daya saing. (Apa kita mampu ?). Pengertian daya saing dapat diterjemahkan dari sisi permintaan (demand-side) dan dari sisi penawaran (supply-side). Produk agribisnis yang akan dipasarkan harus sesuai dengan atribut (keinginan) yang dituntut konsumen.

### 3.2.2. Perubahan nilai pada konsumen yang mempengaruhi perilaku dalam membeli suatu produk agribisnis

a. Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kaitan produk dengan kesehatan dan kebugaran, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat (healty), aman (safety) dan menunjang kebugaran (fitness)

b. Perubahan gaya hidup (life-style)

Masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi produk-produk agribisnis yang bukan sekedar berdimensi fisiologis tetapi juga berdimensi psikologis dan kenikmatan

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan kaitan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kesejahteraan manusia di planet bumi

- Suatu produk agribisnis yang dalam proses produksinya dan atau konsumsinya menimbulkan kemerosotan mutu lingkungan hidup, akan dinilai sebagai produk yang interior (pencemaran air, tanah, udara). (Ingat produl minyak sawit, karet, kayu yang dikaitkan dengan cara/proses produksi).

- Sebaliknya produk yang proses produksinya atau konsumsinya dapat memperbaiki mutu lingkungan hidup akan dinilai sebagai produk yang superior. (Walaupun negara yang paling banyak memproduksi bahan-bahan pestisida dan pupuk an-organik adalah negara-negara maju)

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu nilai bersama (global-value)

- Produk-produk agribisnis yang secara langsung atau tidak langsung melanggar HAM dalam proses produksinya akan mengalami pemboikotan (embargo) di pasar internasional. (Contoh pemakaian tenaga kerja anak-anak di bawah umur di perkebunan, pabrik rokok, industri perikanan dan lain-lain)

Keempat perubahan tersebut di atas telah merubah perilaku konsumen dalam mengevaluasi suatu produk yang akan dibeli. Di masa lalu konsumen hanya mengevaluasi suatu produk berdasarkan atribut utama yakni jenis dan harga, tetapi dewasa ini dan terlebih di masa yang akan datang konsumen menuntut atribut yang lebih rinci antara lain :

- Atribut Keamanan Produk (safety attributes)
- Atribut Nutrisi (nutritional attributes)
- Atribut Nilai (value attributes)
- Atribut Pengepakan (package attributes)
- Atribut Lingkungan (ecolabel attributes)
- Atribut Kemanusiaan (humanistic attributes)

Atribut-atribut tersebut telah melembaga baik secara internasional (misalnya sanitary and phytosanitary pada WTO).



### 3.2.3. Perubahan Lingkungan Domestik

a. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan terjadi beberapa perubahan penting :

- Peran Pemerintah sebelum era otonomi daerah dalam pembangunan agribisnis sangat dominan, saat ini akan berubah jadi : fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan agribisnis
- Pembangunan agribisnis pada era tonomi daerah akan lebih mengandalkan kreativitas rakyat di setiap daerah )peranan dan kemampuan Kepala Daerah)
- Peranan Pemerintah Daerah akan lebih dominan dibanding Pemerintah Pusat
- Peranan masyarakat akan lebih dominan dari Pemerintah. (Dana pembangunan hanya sebagai stimulator sedangkan pembangunan agribisnis sangat tergantung kepada swadaya masyarakat itu sendiri)

Perubahan tersebut membawa amplikasi penting bagi pengelolaan pembangunan agribisnis, yaitu :

- Pembangunan agribisnis akan ditentukan oleh pelaku ekonomi yakni *usaha tani keluarga* (petani), *usaha kecil menengah*, *koperasi* dan *usaha besar*, oleh karena itu Pemerintah Pusat dan daerah perlu memfasilitasi berkembangnya usaha-usaha agribisnis
- Pemerintah Pusat harus lebih memampukan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pembangunan agribisnis

- Kemampuan pemerintah untuk mengorkestra seluruh potensi pembangunan agribisnis perlu ditingkatkan sehingga sinkronisasi program, baik jenis, maupun waktu dapat diwujudkan guna mendorong kreativitas pelaku agribisnis
  - b. Sampai saat ini kelompok terbesar rakyat adalah para petani yang selama ini kurang memiliki kemampuan ekonomi
    - Pembangunan agribisnis ke depan harus memfokuskan *upaya pemberdayaan petani dan organisasi ekonominya*
    - Skala usaha tani petani harus ditingkatkan, untuk itu perlu redistribusi lahan dan mencegah fragmentasi lahan. Alternatif lain adalah sumber peningkatan pendapatan petani perlu dialihkan dari perluasan lahan kepada peningkatan produktivitas baik dari penggunaan barang-barang modal (*capital driven*) maupun dari inovasi teknologi (*innovation driven*)
    - Organisasi ekonomi petani perlu ditumbuh kembangkan *untuk ikut menangani industri hulu dan hilir agribisnis*, sehingga nilai tambah yang ada pada industri hulu dan industri hilir agribisnis dapat dinikmati petani
    - *Bargaining power petani* di pasar input usaha tani maupun pada pasar hasil agribisnis harus ditingkatkan, untuk mencegah *monopolistik* dan *monopsonitis*
    - Kondisi yang sangat sulit diperbaiki selama ini di mana pasar input usaha tani (pupuk, pestisida dan saprodi) dan pemasaran output (produk usaha tani) tidak berada di pihak petani. Untuk tu petani,

UKM, kelompok tani dan koperasi harus didorong untuk menangani pasar input dan pasar output yang lebih besar

**BAB IV**  
**VISI, MISI DAN TUJUAN**  
**PEMBANGUNAN SISITEM DAN USAHA AGRIBISNIS**

**4.1. Amanat GBHN Tahun 1999 – 2000**

Berdasarkan amanat GBHN 1999 – 2000, kekuatan dan kelemahan pembangunan di masa lalu, perubahan lingkungan global serta menyadari tantangan ke depan, visi pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang dipromosikan secara nasional.

Terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan agribisnis yang *berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan* dan *desentralisasi*.

Sistem agribisnis merupakan atotalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari :

**4.1.1. Sub Sistem Agribisnis Hulu (Up Stream Agribusines)**

- Industri perbenihan/ pembibitan tumbuhan dan hewan
- Industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat/ vaksin ternak)
- Industri agro-otomotif (mesin, peralatan pertanian)

**4.1.2. Sub Sistem Usaha Tani (on Form Agribusines)**

- Usaha tani tanaman pangan dan statikultural
- Usaha tani tanaman obat-obatan
- Usaha tani perkebunan
- Usaha tani peternakan, perikanan dan kehutanan

#### **4.1.3. Sub Sistem Pengolahan (Down Stream Agribusines)**

Industri yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product) seperti : industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam (karet, plywood, pulp, kertas, bahan-bahan bangunan seperti kayu, rayon, benang kapas, benang sutera, barang-barang kulit, tali, karung goni), industri agrowisata dan estetika

#### **4.1.4. Sub Sistem Pemasaran**

Kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri antara lain : *promosi, informasi pasar serta intelijen pasar* (market intelligence)

#### **4.1.5. Sub Sistem Jasa**

Kegiatan yang menyediakan jasa bagi sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani dan sub sistem agribisnis hilir antara lain : penelitian dan pengembangan, pengkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, makro ekonomi)



## 4.2. Arah Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis

Ada 5 karakteristik sistem dan usaha agribisnis yang dibangun ke depan yaitu :

### 4.2.1. Berdaya Saing

Dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu harga dan biaya produksi, serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar dan pelayanan yang profesional. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing antara lain : faktor permintaan dan faktor penawaran. Produk yang dihasilkan harus berorientasi pasar (selera pasar). *Paradigma orientasi produksi* harus digeser ke *orientasi pasar*.

“What you can produce ==> What you can market”

### 4.2.2. Berkerakyatan

Dicirikan oleh berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara luas, baik dalam peluang berusaha, kesempatan kerja dan menikmati nilai tambah (pendapatan).

Pemerintah harus mendorong dan memperhatikan usaha kecil dan menengah dan juga usaha skala dalam konsep kerjasama (*kemitraan yang win-win*) dan mempunyai dampak multiplier yang besar. Peranan Pemerintah di Pusat maupun Daerah akan diarahkan untuk memberdayakan dan memfasilitasi dan menumbuhkan kembangkan krestifitas masyarakat luas di seluruh daerah. (ini yang sedang diupayakan di daerah, tapi sangat lambat).

#### 4.2.3. Berkelanjutan

Diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya agribisnis yang semakin besar dari waktu ke waktu yang semakin mensejahterakan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam sistem agribisnis terdapat keterkaitan yang sangat luas antara kepentingan para pelakunya. Ekonomi yang dibangun melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis adalah sistem ekonomi yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya yang kita miliki di setiap daerah, dengan pelaku ekonomi yang tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek (*Myopic*) melainkan melihat kepentingan jangka panjang. Pengembangan teknologi dalam sistem agribisnis mulai dari hulu sampai ke hilir perlu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan (*green industry*). Dengan demikian keseluruhan kegiatan ekonomi yang dikembangkan akan menuju suatu perekonomian yang mengakomodir pelestarian lingkungan (*gree industry*)

#### 4.2.4. Desentralistis

Kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat pelaku sesuai dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan aspirasi masyarakat setempat. (Apakah daerah-daerah yang tertinggal mampu). Sistem pelayanan pemerintah, sistem penunjang dan pemberdayaan masyarakat akan bersifat lokal, beragam dan harus dilakukan oleh daerah setempat. Dengan demikian pembangunan sistem agribisnis pada hakekatnya merupakan *pembangunan ekonomi daerah*, hal ini sesuai dengan esensi otonomi daerah yakni melakukan desentralisasi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Pemberdayaan organisasi ekonomi masyarakat luas sebagai pelaku utama sistem agribisnis, pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan.

Tugas pemerintah pusat difokuskan pada empat hal pokok yaitu :

- Memberdayakan Dinas-dinas Daerah agar mampu mengelola pembangunan sistem dan usaha agribisnis di daerahnya
- Mengorkestra pembangunan sistem agribisnis antara daerah (propinsi) agar dapat berjalan secara sinergis dan harmonis
- Menangani aspek-aspek pembangunan sistem agribisnis yang menyangkut kepentingan beberapa daerah
- Menangani dan mengkoordinasikan kebijaksanaan ekonomi sektoral, antar sektor, makro ekonomi dan perdagangan internasional



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS**

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan sistem dan usaha agribisnis sebagaimana diutarakan pada bab tersahulu, maka beberapa kebijaksanaan berikut ini perlu dilakukan :

#### **5.1. Kebijaksanaan Makro**

Kebijaksanaan makro yang dimaksudkan di sini adalah upaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Kebijakan dilakukan dengan melakukan instrumen makro ekonomi, baik moneter maupun fiskal.

##### **5.1.1. Kebijakan Moneter**

Instrumen moneter seperti suku bunga, uang beredar dan nilai tukar dapat dijadikan alat kebijaksanaan dalam merangsang berkembangnya sistem dan usaha agribisnis. Dengan menetapkan suku bungan yang relatif rendah serta perlakuan kredit khusus bagi investasi dan atau modal kerja unit usaha yang bergerak dalam bidang agribisnis, maka pertumbuhan unit usaha sektor agribisnis diharapkan makin cepat.

Hal lain yang perlu memperoleh perhatian dalam kebijaksanaan suku bunga dan perekreditan adalah tercapainya keseimbangan alokasi kredit pada sub sistem agribisnis hulu, sub sistem on form dan sub sistem agribisnis hilir sedemikian rupa, sehingga ketiga sub sistem tersebut berkembang secara

seimbang. Harus dirancang kebijaksanaan monter untuk memudahkan tersedianya modal bagi usaha-usaha agribisnis.

### **5.1.2. Kebijakan Fiskal**

Dua instrumen penting kebijaksanaan fiskal yang dapat pemerintah adalah alokasi pengeluaran pemerintah untuk membangun dan perlakuan pajak kebijaksanaan perenapan pajak dalam rang memperoleh dana pembangunan harus dilakukan secara bijak agar mampu merangsang dunia suaha yang bergerak dalam sektor agribisnis. Demikian pula pembelanjaan anggaran pembangunan (investasi pemerintah) harus memberikan bobot yang lebih besar terhadap pembangunan sektor riil yang terkait langsung dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Selain investasi pemerintah, masih ada investasi lain yang dapat berpengaruh terhadap sistem dan usaha agribisnis. Investasi yang dimaksud mencakup swasta domestik (PMDN) dan investasi swasta asing (PMA). Investasi PMA dan PMDN memang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh pemerintah karena tergantung pengusaha itu sendiri. Namun pemerintah dapat mempengaruhi keputusan swasta melalui pengalokasian investasi pemerintah pada agribisnis dan bentuk-bentuk promosi yang lain.

Alokasi investasi pemerintah perlu memperhatikan tahap-tahap pembangunan sistem agribisnis. Bila pada suatu daerah misalnya Kawasan Timur Indonesia di mana tahap perkembangan sistem dan usaha agribisnis masih merada pada tahap awal (*natural resources and unskilllabor based*), investasi pemerintah perlu difokuskan pada investasi infrastruktur seperti jalan, irigasi dan lain-lain

dan pada investasi pembinaan kelembagaan lokal dan penyuluhan. Alokasi anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur publik tersebut di daerah akan merangsang masuknya investasi swasta termasuk PMA. Pada daerah di mana tahap perkembangan agribisnisnya sudah memasuki tahap kedua (*capital and unskill-labor based*), investasi pemerintah perlu difokuskan pada pengembangan teknologi sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru bagi agribisnis di daerah tersebut untuk memasuki tahap pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh investasi/ teknologi.

Selain itu diperlukan kebijaksanaan untuk merangsang investasi swasta (PMA, (PMDN) dalam bidang sistem dan usaha agribisnis. Kebijaksanaan promosi masuknya modal asing ke Indonesia yang hanya sekedar masuk tanpa memperdulikan sektor ekonomi mana dimasuki sebagaimana populer di masa lalu, hendaknya jangan diulangi lagi karena terbukti merugikan Indonesia sendiri.

Dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis, kebijaksanaan perpajakan perlu diarahkan untuk mempercepat transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Karena itu, kebijaksanaan perpajakan juga perlu memperhatikan karakteristik dan tahap-tahap pembangunan sistem agribisnis. Pembebasan pajak atau keringanan pajak sejak dimulai investasi sampai mencapai titik impas (*gestation periode*) bagi perusahaan yang mengembangkan industri hilir dan industri hulu, juga dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan agribisnis.

Kemudian untuk mempercepat pengembangan teknologi agribisnis dan peningkatan sumber daya manusia, perlu kebijaksanaan pajak yang kondusif. Perusahaan agribisnis yang mengalokasikan sebagian keuntungan kemampuan (SDM) perlu diberikan keringanan pajak atau diperhitungkan sebagai biaya (keuntungan yang tidak dikenakan pajak). Dengan kebijaksanaan pajak yang demikian diharapkan perusahaan agribisnis akan terangsang untuk memperkuat R & D dan *Human Resources Development* (HRD).

## **5.2. Kebijakan Pengembangan Industri**

Kebijaksanaan pembangunan sektor industri seyogyanya lebih ditujukan untuk menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung kegiatan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis, khususnya untuk memperkuat bagian hulu dan hilir dari sistem agribisnis. Dalam kaitan ini, pembangunan sektor industri harus lebih dirasakan untuk pengembangan agroindustri yang menunjang pengembangan komoditas pertanian adalah utama. Kebijakan untuk memfokuskan pilihan pembangunan sektor industri terhadap agroindustri merupakan kebijakan mendasar yang membutuhkan kearifan dari para penentu kebijaksanaan demi sinkronisasi pembangunan secara nasional.

Untuk mentransformasi keunggulan komperatif menjadi keunggulan bersaing, pembangunan sistem agribisnis ke depan (di samping mengembangkan berbagai komoditas (*deeppening*) struktur industri baik ke hilir (*down stream*) maupun ke hulu (*up stream*). Karakteristik khusus produk pertanian primer yang berbeda dari produk

non pertanian adalah sifatnya yang mudah rusak (*perishable*), beragam kualitas dan kuantitas (*variability*), *bulky* dengan resiko fluktuasi harga yang cukup tinggi. Untuk meningkatkan daya saing produk-produk pertanian sifat-sifat di atas, diperlukan pengembangan industri hilir maupun hulu. Lebih jauh lagi, pendalaman struktur industri agribisnis dimaksudkan untuk memperkuat daya saing. Jika hanya mengendalikan komoditas pertanian primer, Indonesia akan cenderung senantiasa berperan sebagai penerima harga (*price taker*) dalam pasar internasional.

Pendalaman struktur industri agribisnis ke hilir dilakukan dengan mengembangkan industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*), produk semi akhir (*semi finished product*) dan terutama produk akhir (*final product*). Agribisnis berbasis minyak sawit perlu dilakukan pendalaman industri ke hilir dengan mengembangkan berbagai jenis industri oleo pangan (*food oleo*) dan berbagai jenis industri oleo kimia. Agribisnis berbasis karet alam perlu dilakukan pendalaman industri hilir dengan mengembangkan industri pengolahan karet lanjutan seperti industri ban otomotif dan industri barang-barang dari karet.

Pada agribisnis tanaman obat-obatan pendalaman struktur industri hilir perlu dilakukan dengan mengembangkan industri farmasi baik untuk kebutuhan manusia, maupun kebutuhan hewan dan tumbuhan.

Pendalaman struktur industri hilir pada agribisnis berbasis perikanan laut dilakukan dengan mengembangkan industri –agro-otomotif yang menghasilkan mesin dan peralatan yang diperlukan baik pada sub sistem on form agribisnis, maupun pada sub sistem agribisnis hilir (industri pengolahan), serta pengembangan industri agro

kimia seperti industri pupuk, industri pestisida dan industri obat-obatan/ vaksin hewan.

Pengembangan industri pembenihan/ pembibitan ini sangat mendesak sebagai sumber pertumbuhan produktivitas usaha tani. Saat ini industri pembenihan/ pembibitan merupakan salah satu mata rantai sistem agribisnis yang lemah. Dalam pada itu dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan modal dasar yang dapat didayagunakan untuk membangun suatu industri pembenihan/ pembibitan di Indonesia.

Pengembangan industri agro otomotif dapat dikembangkan dengan melakukan penajaman (*focusing*) dari industri mesin dan logam dan logam dasar yang sudah ada, sehingga kebutuhan mesin dan peralatan yang dibutuhkan agribisnis dapat terpenuhi. Demikian pula pengembangan industri agro kimia, industri kimia dasar yang telah ada dapat difokuskan pada agro kimia. Pengembangan *bio fertilizer* dan *bio pesticide* sudah berkembang dan perlu mendapat dukungan dari pihak terkait.

### **5.3. Kebijakan Perdagangan/ Pemasaran dan Kerjasama Internasional**

Perdagangan/ pemasaran komoditas agribisnis biasanya sudah merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan industri pengolahan (agro industri). Tetapi ada kecenderungan pandangan yang demikian menjadikan kegiatan perdagangan/ pemasaran hanya merupakan bagian lanjutan kegiatan setelah produk dihasilkan. Padahal kegiatan perdagangan/ pemasaran spesifikasi dan jumlah produk yang diminta konsumen, harga dan kecenderungan perubahan jenis serta selera konsumen merupakan beberapa contoh fungsi pemasaran yang informasinya dibutuhkan dalam

pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Mengingat hingga saat ini masih banyak dijumpai adanya berbagai kelemahan dan distorsi dalam perdagangan/ pemasaran di dalam negeri, maka diperlukan berbagai kebijaksanaan yang dapat mengefektifkan fungsi-fungsi perdagangan/ pemasaran untuk memperlancar arus barang dan jasa. Mekanisme transparansi pembentukan harga (*price discovery*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Bentuk-bentuk pasar seperti bursa komoditi dan pasar lelang merupakan bentuk pasar yang perlu dikembangkan. Sudah tentu peningkatan kemampuan nilai tukar petani harus menjadi prioritas perhatian dalam kebijaksanaan perdagangan ini.

Posisi Indonesia dalam perdagangan global haruslah tetap ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia. Instrumen-instrumen perdagangan seperti bea masuk dan pajak ekspor harus dirancang dalam kerangka memperkuat struktur industri termasuk agro industri dan merangsang tumbuhnya usaha-usaha agribisnis nasional. Harus ada kebijaksanaan tarif untuk memberikan perlindungan yang wajar bagi produk-produk agribisnis lokal. Dalam konteks kerjasama seperti AFTA, APEC kepentingan ekonomi nasional harus menjadi fokus yang perlu diposisikan.

Untuk mendukung pengembangan agribisnis, kantor-kantor perwakilan Indonesia di negara-negara lain (kantor duta besar konsulat) perlu didayagunakan untuk mendukung pembangunan agribisnis di Indonesia selain kepentingan politik luar negeri. Kantor-kantor perwakilan tersebut harus menjadi pusat promosi produk-produk agribisnis Indonesia di negara tersebut. Dengan demikian kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dapat berfungsi sebagai *entry point* usaha-usaha

agribisnis Indonesia untuk memasuki pasar negara lain. Selain itu, kantor perwakilan kita perlu secara proaktif “*market inteleganec*” diantaranya melakukan kegiatan pemantauan peluang-peluang pasar produk agribisnis yang berprospek dan perusahaan-perusahaan yang dapat diajak menjadi partner pengusaha agribisnis Indonesia.

Selain kebijaksanaan domestik, kebijaksanaan negara lain yang mengekspor produk agribisnisnya ke Indonesia perlu diperhatikan dalam manajemen perdagangan internasional. Produk-produk agribisnis yang menerapkan *dumping*, sehingga seakan-akan kompetiur di Indonesia perlu memperoleh perhatian. Oleh karena itu undang-undang atau peraturan anti dumping di Indonesia perlu dibuat sesegera mungkin.

#### **5.4. Kebijaksanaan Pengembangan Infrastruktur**

Keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tetapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik akan lebih efektif apabila :

(a) agribisnis sesuai dengan kebutuhan/ kepentingan publik; (b) mampu menunjang pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat banyak dan (c) mampu merangsang tumbuhan usaha-usaha atau investasi baru yang dapat memacu perkembangan ekonomi wilayah. Dalam kaitannya dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, maka kebijaksanaan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak pelaku agribisnis dan mampu merangsang para investor untuk melakukan usaha agribisnis. Infrastruktur seperti sarana



pengairan dan drainase, jalan listrik, *farm road*, pelabuhan (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di Wilayah Timur Indonesia), transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan usaha agribisnis.

### **5.5. Kebijaksanaan Pengembangan Kelembagaan**

Dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, hal yang perlu dikembangkan bukan sekedar unit-unit usaha fisik yang tidak berkelanjutan, tetapi unit-unit usaha yang mampu berkembang karena memang dibutuhkan sebagai bagian dari keberlangsungan sistem dan usaha agribisnis. Dengan kata lain, berbagai fungsi atau usaha yang bersifat melembaga perlu diupayakan melalui berbagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dimaksud antara lain :

#### **5.5.1. Pengembangan Lembaga Keuangan**

Kebutuhan permodalan dalam sistem dan usaha agribisnis akan selalu berlangsung sesuai perkembangan usaha. Kebijaksanaan penyediaan modal (*credit program*) yang sifatnya langsung berupa bantuan modal saja dapat menyebabkan ketergantungan para pelaku agribisnis terhadap uluran tangan pemerintah. Oleh karena itu fokus kebijaksanaan mendatang perlu ditujukan untuk pengembangan lembaga keuangan untuk menjadi sumber permodalan bagi usaha-usaha agribisnis. Khusus bagi petani sebagai pelaku agribisnis perlu diupayakan penyediaan kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga kondusif serta sistem agunan yang dapat dipenuhi petani.

Untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, perbankan perlu mengembangkan skim-skim per Kreditan (jenis, besaran dan persyaratan) yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis dalam arti sesuai dengan tahap-tahap perkembangan agribisnis. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mengarahkan, sistem perbankan ke daerah dengan mengembangkan *unit banking system* sebagai pengganti *branch banking system* yang ada saat ini.

Kegiatan usaha yang dilakukan penduduk Indonesia saat ini masih banyak yang tergolong sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, di mana umumnya usaha-usaha tersebut belum sepenuhnya dapat terlayani oleh lembaga perbankan (bank umum). Oleh karena itu lembaga keuangan mikro (LKM) di pedesaan yang tentu saja harus didukung dengan kebijakan dan strategi pengembangan LKM yang komprehensif.

Jenis-jenis LKM pedesaan yang dapat dikembangkan dan atau ditumbuhkan kembali (karena sebelumnya sudah ada) antara lain BPR-BKD (Badan Kredit Desa, BPR Nomn BKD seperti Bank Desa, Bank Pasar dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada di daerah seperti lumbung pitih nagari, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Lembaga Kredit Pedesaan (LKP), Lembaga Kredit Kecamatan (LKK), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam perlu dipertahankan dan dimodernisasi.

### **5.5.2. Pengembangan Fungsi Penelitian dan Pengembangan**

Dengan bergesernya peranan pemerintah dalam proses pembangunan di masa mendatang, fungsi pemerintah dalam menghasilkan teknologi dan berbagai model kelembagaan sistem agribisnis akan semakin strategi dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Saat ini memang fungsi penelitian tersebut didominasi oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah. Namun di masa depan, dengan terbatasnya sumber daya penelitian yang dimiliki pemerintah, keterlibatan penelitian oleh pihak swasta, organisasi profesi, LSM dan organisasi petani sangat dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijaksanaan yang dapat merangsang keterlibatan pihak non pemerintah dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang menunjang pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Khusus untuk teknologi yang ditujukan untuk diadopsi oleh petani, maka proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian partisipatif harus dijadikan perencanaan dan pelaksanaan penelitian partisipatif harus dijadikan strategi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan petani.

Pendalaman struktur industri agribisnis harus didukung kebijaksanaan pengembangan teknologi. Untuk mendukung pendalaman struktur industri agribisnis, pengembangan bioteknologi perlu dijadikan salah satu alternatif. Bioteknologi sangat luas penerapannya dalam pembangunan agribisnis yakni dibutuhkan pada pengembangan industri pembenihan/ pembibitan, industri farmasi, industri makanan/ minuman, industri pengolahan limbah biologis agro kimia juga sangat penting. Dengan kata lain, untuk mengembangkan

agribisnis paling sedikit ketiga aspek/ bidang teknologi tersebut yakni bioteknologi, teknologi agro otomotif (meknika), teknologi agro kimia (kimiawi) perlu memperoleh prioritas utama.

Selain pengembangan bioteknologi, penerapan teknologi kultur jaringan yang ditujukan untuk mengembangkan bibit/ benih unggul juga perlu mendapat perhatian. Hal ini sangat penting, karena bibit/ benih merupakan *blue print* atribut nutrisi dari produk-produk agribisnis yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, produk mangga dengan atribut manis, harum, kaya vitamin C, kaya serat, secara alamiah (bukan diperkaya), yang dituntut konsumen, hanya dapat dihasilkan bila pada bibit mangga mengandung *blue print* yang demikian. Singkatnya, pengembangan kultur jaringan pada sub sektor agribisnis hulu ini ditujukan untuk mengembangkan bibit/ benih yang mengandung *blue print* atribut produk yang dituntut konsumen, di samping memiliki kemampuan produktivitas tinggi.

Pada sub sektor *orn farm agribusiness*, pengembangan teknologi diarahkan pada penggunaan teknologi *eco farming* dan *organic farming* seperti teknologi *zero/ minuman tillage*, teknologi konservasi tanah dan air, teknologi biologi tanah, teknologi pemberantasan hama dan penyakit tanaman dan hewan secara biologis dan lain-lain. Dengan demikian komoditas primer yang dihasilkan dari sub sektor *on form agribusiness* ini memenuhi tuntutan *eco labeling* dan *food safety*.

Selanjutnya pengembangan teknologi prosesingan produk pada sub sektor agribisnis hilir (agroindustri hilir) diarahkan untuk peningkatan efisiensi,

pengembangan diversifikasi teknologi prosesing untuk menghasilkan diversifikasi produk, meminimumkan teknologi prosesing untuk menghasilkan diversifikasi produk, meminimumkan *waste* dan *pollutan*, pengembangan teknologi produk yang mengakomodir *value attributes* dan *package attributes*.

### 5.5.3. Pengembangan SDM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih tinggi lagi adalah pelaku langsung dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Untuk membangun sistem agribisnis, paling sedikit terdapat tiga sasaran penting pengembangan SDM agribisnis di Indonesia. Pertama adalah mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga searah dengan kemampuan kewirausahaan (*enterpreneurship*) sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/ tangguh dalam hal ini mencakup SDM agribisnis pelaku langsung seperti tenaga kerja yang bekerja pada sub sektor agribisnis hulu, sub sektor *on form agribusiness* dan sub sektor agribisnis hilir, dan SDM agribisnis pendukung sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, SDM perbankan dan SDM penyedia jasa bagi agribisnis.

Dalam upaya pengembangan pembinaan SDM agribisnis nasional, kita perlu lebih menajamkan program pembinaan SDM agribisnis dengan

mendayagunakan Diklat-diklat Departemen Teknis, lembaga pengembangan SDM perguruan tinggi dan perusahaan swasta, secara terencana dan terarah. Dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja dapat menjadi koordinator, perencana dan pengevaluasi program pembinaan SDM agribisnis berskala nasional atau global, yang kemudian diterjemahkan pada program-program pengembangan SDM pada *level* perusahaan atau pada *level* Balai Penyuluhan Pertanian (agribisnis). Dengan perkataan lain, kita memerlukan sistem pembinaan dan pengembangan SDM agribisnis nasional yang mampu meningkatkan wawasan *micro-macro-global behavior* dari SDM agribisnis sedemikian rupa sehingga *teamwork* yang harmonis dapat operasional.

Kualitas dan kemampuan aparat yang mampu meningkatkan kreativitas sumber daya manusia pelaku agribisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Perkembangan tahapan kemajuan sistem agribisnis sangat tergantung pada tingkat keahlian yang dimiliki oleh pelaku agribisnis. Oleh karena itu perlu dibuat berbagai kebijaksanaan yang dapat mengefektifkan fungsi penyuluhan dengan sasaran khusus pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Sasaran penyuluhan perlu diperluas tidak hanya pada petani, tetapi juga perlu agribisnis lainnya. Demikian pula lingkup penyuluhan harus mencakup agribisnis hulu, on farm dan agribisnis hilir (termasuk pemasaran). Di samping itu penyuluhan dalam rangka pengembangan kelembagaan ekonomi petani juga perlu dilakukan. Khusus untuk penyuluhan dengan sasaran petani sebagai salah satu pelaku

agribisnis, pendekatan penyuluhan partisipatif perlu dijadikan kebijaksanaan pengembangan penyuluhan.

#### **5.5.4. Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani**

Pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat di setiap daerah memerlukan pengembangan kelembagaan dan organisasi ekonomi. Akibat paradigma pembangunan di masa kelembagaan internasional/ lokal yang sebelumnya bagian dari perekonomian lokal menjadi rusak bahkan hilang. Oleh sebab itu, kelembagaan tradisional/ lokal perlu dibandingkan kembali dan didayagunakan untuk pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Kelembagaan pangan tradisional seperti kelembagaan lumbung desa/ keluarga di setiap daerah perlu dikembangkan kembali dan dijadikan sebagai kelembagaan ketahanan pangan (*food security*) nasional. Sistem kelembagaan pangan yang berbasis pada keanekaragaman bahan pangan dan budaya lokal akan mampu menjadi sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh dan efisien. Oleh karena itu kelembagaan pangan yang demikian perlu dihidupkan kembali.

Pengembangan organisasi ekonomi rakyat beserta jaringan bisnisnya perlu dikembangkan lebih lanjut. Organisasi ekonomi seperti koperasi perlu ditumbuh kembangkan sebagai organisasi ekonomi petani. Pengembangan koperasi agribisnis ke depan perlu diarahkan sebagai organisasi ekonomi petani pada sub sistem agribisnis hilir maupun pada sub sistem agribisnis hulu dan bukan hanya pada sub sistem *on farm*. Koperasi agribisnis pada sub



sistem agribisnis hilir dan pada sub sistem agribisnis hilir dapat mengembangkan jaringan usaha (bentuk usaha patungan) dengan perusahaan swasta (PMA, PMDN). Dengan cara pengembangan koperasi agribisnis yang demikian, meskipun petani tetap di pedesaan, namun organisasi ekonominya menjangkau hingga ke negara lain. Sehingga nilai tambah yang ada pada sub sistem agribisnis hulu dan sub sistem agribisnis hilir dapat dinikmati oleh rakyat di daerah melalui koperasinya. Koperasi agribisnis yang perlu dikembangkan adalah koperasi dari kelompok tani yang tumbuh berdasarkan kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi dalam kegiatan usaha tani. Oleh karena itu kelompok tani yang telah berfungsi sebagai modal kerjasama, kelas belajar mengajar dan sebagai unit produksi dikembangkan menjadi kelompok usaha yang berwawasan agribisnis.



#### **5.6. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang mendayagunakan keragaman sumber daya alam (hayati) tidak akan sustainable bila keanekaragaman itu tidak di lestarian. Oleh karena itu upaya pelestarian sumber daya keragaman hayati perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian sumber daya keragaman hayati antara lain :

- Pelestarian plasma nuftah yang akan berfungsi sebagai bank genetik
- Pelestarian hutan, tanah dan air



- Upaya melegasi hak ulayat atas tanah-tanah adat sehingga akan lebih dapat dimanfaatkan
- Mempelajari pemanfaatan lahan –lahan tidur dengan cara menetapkan pajak yang tinggi atas lahan tersebut

### **5.7. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah**

Keseluruhan kebijaksanaan pengembangan sistem dan usaha agribisnis seperti sudah dikemukakan terdahulu secara operasional akan terjadi di daerah karena disanalah basis sumber dayanya.

Untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, perlu dikembangkan atau diorganisasikan dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan agribisnis di daerah sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Pengembangan pusat-pusat agribisnis tersebut harus dikaitkan dengan ekonomi regional sedemikian rupa sehingga secara bertahap agribisnis daerah yang bersangkutan main terintegrasi dengan perekonomian regional dan dunia.

Pada pusat-pusat pertumbuhan agribisnis perlu dilengkapi infrastruktur yang diperlukan seperti jalan baik yang menghubungkan industri pengolahan dengan sub sistem *on farm* maupun antar pusat pertumbuhan agribisnis dengan pelabuhan ekspor.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis daerah ini haruslah inklusif dengan pembangunan daerah yang bersangkutan. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang eksklusif seperti di masa lalu hendaknya tidak perlu diulang lagi. KAPET yang perlu dikembangkan ke depan adalah KAPET agribisnis yang sangat terintegrasi dengan ekonomi rakyat daerah.

Sehingga kehadiran KAPET agribisnis tersebut benar-benar memfasilitasi pengembangan ekonomi daerah. Kapet-kapet agribisnis juga dimaksudkan dapat terbentuk Kawasan Agroindustri Terpadu (KAT), serta pengembangan Sentra Produksi Agribisnis Komoditi Unggulan (SPAKU) dan Kawasan Andalan (KADAL). Pola intensif yang mampu merangsang investasi agribisnis oleh para pengusaha lokal di kapet-kapet agribisnis tersebut perlu diciptakan, khususnya oleh pemerintah daerah.

### **5.8. Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan**

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, bahwa pengembangan pangan dan kesejahteraan petani adalah kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah adalah melaksanakan pengaturan dan pengendalian agar berkembang suatu sistem pengusahaan pangan yang adil dan bertanggung jawab.

Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya pangan, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun kesesuaian dengan sosio kultur, dapat dijangkau secara fisik maupun ekonomi dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan individu, setiap waktu, untuk sehat, tumbuh dan produktif. Unsur utama dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang menjamin setiap individu dapat mengakses, serta mengkonsumsi yang menjamin setiap individu setiap memperoleh asupan zat gizi dengan jumlah dan keseimbangan yang cukup. Dengan pengertian tersebut, maka agribisnis komoditas pangan yang berbasis sumber daya pangan lokal, yang menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai ragam produk serta

memberikan pendapatan bagi masyarakat, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terwujudnya ketahanan pangan.

Komponen dari sistem ketahanan pangan yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi, tidak lain adalah usaha berbasis agribisnis. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan pendekatan sistem agribisnis, yang merupakan rangkaian yang terintegrasi antara sub sistem hulu, usaha tani hilir dan sub sistem jasa. Dengan pendekatan, (a) kelembagaan dan budaya lokal; (b) efisiensi ekonomi dan keunggulan kompetitif wilayah; (c) pengaturan distribusi pangan mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif; (d) sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan petani. Mengingat aktor dari sistem ketahanan pangan adalah para pelaku usaha yaitu produsen, pengolah dan distribusi yang sebagian besar pengusaha kecil, maka upaya peningkatan dari pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dalam kerangka memberdayakan kelompok masyarakat agar mampu, mandiri dalam mengembangkan usahanya secara mekanisme pasar yang berkeadilan.

Kebijakan ketahanan pangan adalah kebijakan yang bersifat menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang menunjang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, agar setiap individu mengakses pangan dan mengelola konsumsinya untuk memenuhi kecukupan gizi. Dalam hal sub sistem ketersediaan pangan, kebijakan yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan antara produksi, ekspor, impor dan konsumsi sehingga terjadi keseimbangan sesuai dengan kebutuhan pada wilayah yang bersangkutan dan antar wilayah dari waktu ke waktu pada tingkat harga yang proposional. Kebijakan sub sistem distribusi pangan diarahkan untuk mendorong

kelancaran proses distribusi dari lokasi produsen dengan konsumen sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses pangan dari waktu ke waktu sesuai yang dibutuhkannya. Demikian pula, kebijakan sub sistem konsumsi pangan diarahkan untuk mendorong masyarakat pangan sehingga setiap individu mendapat asupan zat gizi yang cukup dan seimbang.

## **BAB VI**

### **PELUANG USAHA AGRIBISNIS**

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa pembangunan usaha agribisnis memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia mempunyai keunggulan komperatif (comperative advantage) sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komperatif tersebut merupakan fundamental ekonomi sehingga menjadi didayagunakan bersaing (kompetitive advantage). Dengan demikian perekonomian landasan yang kokoh pada sumbernya domestik, memiliki kemampuan bersaing dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komperatif telah berkembang di Indonesia dalam bentuk pembangunan pertanian yang merupakan salah satu sub sistem agribisnis. Pengalaman di masa lalu membuktikan bahwa pembangunan industri masa pertanian, industri hilir serta usaha-usaha jasa-jasa pendukung secara harmonis dan simultan tidak mampu mendayagunakan keunggulan komperatif menjadi keunggulan bersaing. Meskipun Indonesia berhasil menjadi salah satu produsen terbesar pada beberapa komoditas pertanian dunia tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional dan pada akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat bergantung kepada negara-negara lainnya. Selain itu, nilai tambah yang kita raih dari pemanfaatan keunggulan komperatif tersebut masih sangat kecil sehingga tingkat pendapatan masyarakat tetap rendah.

Belajar dari pengalaman masa lalu tersebut, pendekatan pembangunan ekonomi dalam rangka mendayagunakan keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif perlu dirubah dari pembangunan pertanian kepada pembangunan sistem agribisnis di mana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian serta sektor yang menyediakan jasa yang perlukan dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Pembangunan usaha agribisnis perlu ditempatkan bukan hanya sebagai pendekatan baru pembangunan pertanian, tetapi lebih dari itu pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan sebagai penggerak utama (grand strategy) pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan (agribusiness-led development). Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, yaitu :

- Perekonomian yang berdaya saing berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara agraris dan maritim
- Menunjukkan bahwa sistem agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), kesempatan bekerja dan berusaha serta dalam ekspor
- Sistem dan usaha agribisnis merupakan pembentukan PDBR, kesempatan bekerja dan berusaha maupun dalam ekspor daerah
- Dengan membangun sistem dan usaha agribisnis maka secara built-in membangun sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman bahan pangan, budaya dan kelembagaan lokal
- Pembangunan sistem dan usaha agribisnis berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup

Propinsi Sumatera Utara sebagai salah satu propinsi yang telah memiliki potensi kondisi perekonomian yang baik bersama beberapa agribisnis, di mana dapat dilihat bahwa sebagian besar areal perkebunan baik perkebunan negara maupun swasta berada di propinsi Sumatera Utara demikian juga usaha pertanian hortikultur, perikanan maupun industri hulu dan industri hilir pertanian.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peluang usaha agribisnis secara nasional maupun secara regional memiliki peluang pengembangan yang sangat besar, karena pembangunan sektor tersebut didukung oleh sumber daya alam baik cadangan lahan, kondisi iklim, potensi kelautan (maritim) potensi peternakan dan potensi sumber daya hutan.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN**

1. Pembangunan agribisnis sebagai pendekatan baru dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional telah mulai terlaksana, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan. Untuk memecahkan persoalan ekonomi yang sangat kompleks, khususnya pada sektor pertanian, Indonesia memerlukan penajaman (focusing) strategi pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberi solusi atas persoalan yang ada
2. Dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini, untuk menjamin fundamental ekonomi yang kuat Indonesia dapat menggerakkan perekonomian nasional dengan cepat. Pilihan tersebut haruslah bidang agribisnis yang merupakan sinergis antara pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta pembangunan sektor jasa yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu investasi harus difokuskan ke bidang pembangunan usaha pertanian, termasuk infrastruktur pendukungnya agar diperoleh economic return dan distribusi income yang tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Anwar A., 1998. Peranan Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Memulihkan dan Memberikan Landasan Yang Kuat Kepada Perekonomian Nasional. IPB - Bandung
2. Hardiansyah, 2000. Review on Food. Aspect of Food and Nutrition Policy in Repelita VI. Makalah Disajikan Pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
3. Harizt Intan A., 1996. Strategi Pengembangan Agribisnis. Magister Manajemen Agribisnis. IPB - Bandung
4. Kotler P., 2003. Marketing Management Newjersey. Prentice Hall, Inc. Englewood
5. Saragih B., 2001. Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. IPB - Bandung
6. Simatupang P., 1995. Industrialisasi Pertanian Sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian Era Globalisasi. Pengukuhan Sebagai Ahli Peneliti Utama, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian
7. Soekartawi, 2003. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
8. Tambunan TTH., 2003. Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia, Jakarta
9. Wibowo R., 2000. Pertanian dan Pangan Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta